



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 beberapa Perangkat Daerah harus disesuaikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023, Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Perangkat Daerah harus mengintegrasikan pohon kinerja dalam Dokumen Perencanaan, sehingga Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

l

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026.

2

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32) diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Desember 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

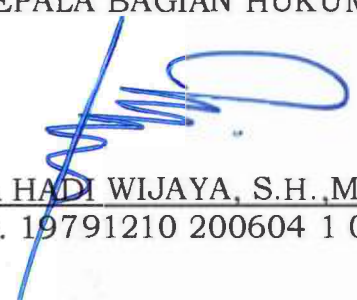
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA BLITAR NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA
BLITAR TAHUN 2021 – 2026

1. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur staf mempunyai tugas membantu Wali Kota Blitar dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Oleh karenanya Sekretariat Daerah Kota Blitar memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Blitar.

Dalam rangka melaksanakan tugas diatas perlu kiranya disusun dokumen perencanaan yang dapat memberikan gambaran dukungan Sekretariat Daerah Kota Blitar dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Blitar. Rencana Strategis yang disusun merupakan rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dari Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah Kota Blitar.

Berkenaan dengan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Selanjutnya Perubahan Renstra Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ini menjadi acuan kerja di semua unit di lingkungan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

25. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rencana tersebut dilakukan identifikasi, analisa dan pemecahan masalah dalam menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Renstra berfokus pada pengembangan visi Pemerintah Kota Blitar yang luas dan strategis khusus berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan atau “trends” dan mengembangkan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

Renstra merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (performance). Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk Perubahan Kedua Renstra sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses penyusunan Renstra ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program OPD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungnya yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap OPD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja OPD.

Fungsi Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 (lima) tahunan berfungsi:

- a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan;
- b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai dokumen operasional tahunan di OPD.

Proses Penyusunan Renstra:

- a. Tahap Persiapan
Pembentukan tim penyusunan Perubahan Kedua Renstra OPD dan menyusun agenda kerja. Tim penyusunan Perubahan Kedua Renstra OPD bertugas menyelenggarakan forum OPD, merumuskan rancangan Perubahan Kedua Renstra OPD dan menyusun rancangan penetapan Perubahan Kedua Renstra OPD oleh Kepala OPD dengan Keputusan kepala OPD. Tim penyusun tersebut terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di masing-masing OPD dan diketuai oleh orang yang bertanggung jawab atas perencanaan di OPD yang bersangkutan.
- b. Tahap Perumusan/Penyusunan
Pengolahan data dan informasi
Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Bakesbangpol Kota Blitar.
- c. Analisis gambaran pelayanan OPD, terdiri:
 - 1) Analisis gambaran umum pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD

- 2) Analisis pengelolaan pendanaan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada spek pendanaan pelayanan OPD
- d. Review Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, mencakup:
 - 1) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L
 - 2) Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas
 - 3) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten/Kota.
 - 4) Program prioritas OPD Propinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
- e. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup:
 - 1) Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang
 - 2) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah
- f. Perumusan Isu- isu Strategis
- g. Perumusan visi dan misi
- h. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD
- i. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD
- j. Tahap Verifikasi
- k. Tahap Penetapan

Keterkaitan Renstra Bakesbangpol Kota Blitar dengan dokumen-dokumen Perencanaan lainnya:

- a. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD Kota Blitar.

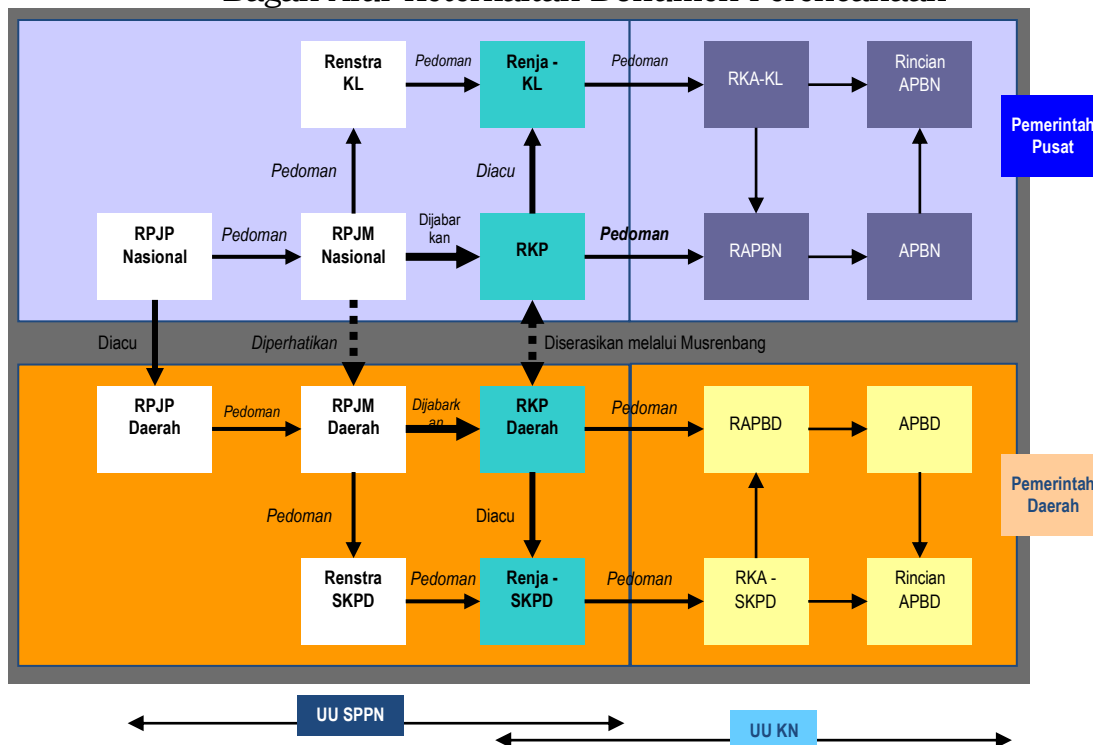
Renstra berpedoman pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan:

 - 1) Renstra sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJMD.
 - 2) Renstra memuat visi, misi arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh OPD yang berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- b. Keterkaitan Renstra dengan Renja Bakesbangpol Kota Blitar.

Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Renja yang disusun sebagai dokumen Renja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja setiap tahun anggaran.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bakesbangpol yang berpedoman pada RPJMD Kota Blitar dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Renja. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bakesbangpol dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

Dalam pelaksanaannya Rencana Strategis Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2021-2026, perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Perubahan Renstra Bakesbangpol Kota Blitar ini dilakukan karena beberapa hal:

1. Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak pada pemutakhiran seluruh kode sub kegiatan dan penambahan sub kegiatan.
2. Tindak lanjut evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan. Penyesuaian dilakukan pada level tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai hasil pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur erencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur erencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026;
34. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renstra Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat Daerah untuk 5 (lima) Tahun ke depan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan program dan kegiatan strategi yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kota Blitar dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menyediakan arah kebijakan pembangunan Daerah untuk 5 (lima) Tahun ke depan. Perubahan Renstra Bakesbangpol Tahun 2021 – 2026 ditetapkan dengan maksud untuk melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021–2026.

Adapun tujuan penyusunan perubahan Renstra antara lain:

- a. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Bakesbangpol Kota Blitar selama 5 (lima) tahun terakhir pada periode pembangunan yang lalu
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Bakesbangpol Kota Blitar selama 5 (lima) Tahun mendatang
- c. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 kedalam tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan
- d. Menetapkan rencana program dan kegiatan Bakesbangpol Kota Blitar yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) Tahun mendatang

- e. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Bakesbangpol Kota Blitar selama 5 (lima) tahun mendatang
- f. Menyediakan panduan penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD dan
- g. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun
- h. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan
- i. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan
- j. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima

1.4. Sistematika Penyusunan

Perubahan Kedua Renstra Bakesbangpol Kota Blitar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, Fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Renja OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Kedua Renstra OPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Kedua Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Provinsi dan Renstra OPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari:
1. Gambaran pelayanan OPD;

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra OPD
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan
4. Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BLITAR

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Bakesbangpol Kota Blitar

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar, maka Bakesbangpol Kota Blitar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

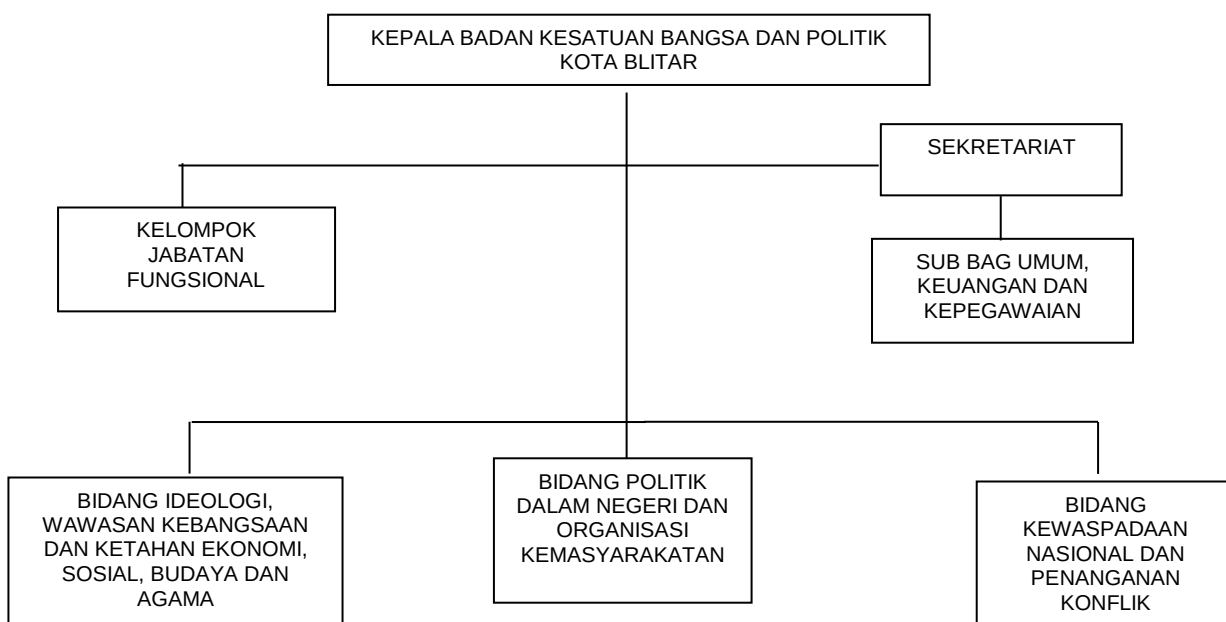
- a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pelaksanaan evaluasi politik;
- d. penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan; dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan;
- f. Pengkoordinasian kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
- i. pelaksanaan pendataan, penyusunan kebijakan dan pembinaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
- j. pelaksanaan pendataan, analisa, pembuatan kajian, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- l. pelaksanaan analisa guna peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
- m. pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- n. penyusunan kebijakan penanganan SARA dan konflik sosial di Kota Blitar;
- o. perumusan kebijakan peningkatan keaktifan organisasi masyarakat dan organisasi politik di Kota Blitar;
- p. penyusunan kebijakan indeks kapasitas daerah;
- q. penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup badan kesatuan bangsa dan politik;
- r. perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
- s. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- t. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesatuan bangsa dan politik secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- u. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas Badan;

- v. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya susunan organisasi Bakesbangpol terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi



Uraian tugas dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

I. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.

II. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.
- (3) Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan fungsi:
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;

- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
- d. fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Badan;
- i. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
- j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha badan;
- m. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
- n. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- o. pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan
- p. fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
- q. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- r. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- s. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- t. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
- u. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusan kesatuan bangsa dan politik;
- v. fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- w. fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Standart Pelayanan Minimal urusan Kesatuan bangsa dan politik;
- x. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- y. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- z. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan badan kesatuan bangsa dan politik secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
 - aa. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
 - bb. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- III. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan penatausahaan barang, kepegawaian dan pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;
 - e. melakukan penatausahaan keuangan badan dan pengelolaan urusan gaji pegawai badan, serta verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ);
 - f. penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup badan;
 - g. melaksanakan dan mengelola surat-menyurat dan tata kearsipan;
 - h. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
 - i. pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - j. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;
 - k. melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris atau asset perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - m. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - n. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian dan tugas-tugas kehumasan;
 - o. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - p. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - q. melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
 - r. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang; dan

- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- IV. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama. Untuk menjalankan tugas dimaksud Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pendukung dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - d. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia;
 - e. penyusunan instrumen operasional tugas dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tugas dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - g. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- V. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. Untuk menjalankan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;

- c. penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas di bidang partai politik dan pemilihan umum serta kelembagaan dan pendidikan budaya politik;
 - e. pelaksanaan program, evaluasi dan kajian strategis serta kerjasama dibidang Politik dalam negeri;
 - f. fasilitasi kegiatan di bidang partai politik dan pemilihan umum serta kelembagaan dan pendidikan budaya politik;
 - g. penyusunan instrumen operasional tugas bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tugas bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - i. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- VI. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/ atau kegiatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan Kepala Badan;
 - b. penyusunan program dan/ atau kegiatan pendukung di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - d. pelaksanaan program, evaluasi dan kajian strategis serta kerjasama dibidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - e. fasilitasi kegiatan bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - g. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - h. penyusunan instrumen operasional tugas bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - j. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Badan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Jabatan fungsional diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

VIII. Mekanisme Pelaksanaan Tugas

- a. struktural lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- b. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
- c. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- d. Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- e. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- f. Dalam pelaksanaan tugas Badan, Kepala Badan memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf.
- g. Sekretaris sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang serta memberikan pembinaan dan/atau pertimbangan administratif.
- h. Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kepala Badan serta memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.
- i. Kepala Sub Bagian dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi kepada atasan masing-masing serta memberikan pengaraban, perintah dan petunjuk kepada bawaban masing-masing.
- j. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan penunjukan dan surat tugas dari Kepala

Badan sekaligus melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Badan.

- k. Penugasan sebagaimana bersifat mendukung pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- l. Penugasan yang dimaksud mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dengan hasil kegiatan dilaporkan kepada Kepala Badan.
- m. Dalam hal pejabat administrasi yang disetarakan kedalam jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk dan menugaskan pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas jabatan administrasi sebelum disetarakan melalui surat penugasan.
- n. Mekanisme sistem kerja diatur tersendiri dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar

1. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan struktur organisasi diatas, komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Bakesbangpol Kota Blitar per November Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan kualifikasi pendidikan:
 - S3 berjumlah : - orang
 - S2 berjumlah : 4 orang
 - S1 berjumlah : 11 orang
 - D3 berjumlah : 0 orang
 - SLTA berjumlah : 5 orang
 - SD berjumlah : - orang
- b. Berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut:
 - Pembina Utama Muda : 1 orang
(IV/c)
 - Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang
 - Pembina (IV/a) : 4 orang
 - Penata Tk. I (III/d) : 6 orang
 - Penata (III/c) : - orang
 - Penata Muda Tk. I (III/b) : 3 orang
 - Penata Muda (III/a) : 1 orang
 - Pengatur Tk. I (II/d) : 4 orang
 - Pengatur (II/c) : - orang
 - Pengatur Muda Tk. I : - orang
(II/b)
 - Pengatur Muda (II/a) : - orang
 - Juru Tk. I (I/d) : - orang
 - Juru (I/c) : - orang
 - Juru Muda Tk. I (I/b) : - orang
 - Juru Muda (I/a) : - orang
- c. Jabatan Struktural dan Fungsional yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar terdiri dari:
 - Eselon II/a : - orang
 - Eselon II/b : 1 orang
 - Eselon III/a : 1 orang
 - Eselon III/b : 3 orang
 - Eselon IV/a : 1 orang

- Fungsional : 6 orang
 - d. Berdasarkan jenis kelamin:
 - Laki-laki : 16 orang
 - Perempuan : 4 orang
 - e. Berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional :
 - Diklat Pim IV : 9 orang
 - Diklat Pim III : 1 orang
 - Diklat Pim II : 1 orang
 - Diklat Fungsional : - orang
- Sumber Data: Bakesbangpol (November 2023)

2. Aset

Selain sumber daya manusia, Bakesbangpol Kota Blitar telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana kerja yang mengarah pada pencapaian sistem kinerja yang baik. adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini dapat diinformasikan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 2.2.1
Data Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	AC Split	16 Buah	11 Baik, 5 Rusak
2	Access Point	1 Buah	Baik
3	Aksesoris Kendaraan Bermotor	4 Buah	Baik
4	Alamat Pemadam	8 Buah	Baik
5	Alat Keamanan	16 Buah	Baik
6	Exhaust Fan	1 Buah	Rusak
7	Faximile	1 Buah	Baik
8	Field Bed	16 Buah	Rusak
9	Filling Cabinet Besi	8 Buah	Baik
10	Genset	1 Buah	Rusak
11	Gerobak Dorong Arco	2 Buah	Baik
12	Gorden	2 Buah	Baik
13	GPS Garmin Map	1 Buah	Baik
14	Handphone	18 Buah	Rusak
15	Handy Talkie	93 Buah	25 Baik, 68 Rusak
16	Handycam	4 Buah	Rusak
17	Kamera CCTV	2 Buah	Baik
18	Kamera Digital	8 Buah	2 Baik, 6 Rusak
19	Karpet Bak Pick Up	1 Buah	Baik
20	Karpet Permadani	3 Buah	Baik
21	Kendaraan Roda 4	5 Buah	4 Baik, 1 Rusak
22	Kompor Gas	1 Buah	Baik
23	Komputer / PC	19 Buah	5 Baik, 14 Rusak
24	Kursi	70 Buah	40 Baik, 30 Rusak
25	Lampu Flash	1 Buah	Baik
26	Laptop	22 Buah	14 Baik, 8 Rusak
27	LCD Proyektor	3 Buah	1 Baik, 2 Rusak
28	Lemari Es	1 Buah	Baik
29	Lemari Kayu	24 Buah	18 Baik, 6 Rusak
30	Meja	38 Buah	Baik
31	Mesin Absensi	1 Buah	Baik
32	Mesin Gergaji	5 Buah	3 Baik, 2 Rusak
33	Mimbar / Podium	1 Buah	Baik
34	Motor Boat	2 Buah	Baik

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
35	Pallet Plastik	10 Buah	Baik
36	Papan Jalur Evakuasi	40 Buah	Baik
37	Papan Nama Instansi	5 Buah	Baik
38	Perahu Karet	2 Buah	Rusak
39	Peralatan APD	6 Buah	Rusak
40	Peralatan Olahraga	2 Buah	Rusak
41	Pompa Air	2 Buah	Baik
42	Printer	50 Buah	18 Baik, 32 Rusak
43	Radio RIC	1 Buah	Baik
44	Rak Siku Besi	7 Buah	Baik
45	Rambu Jalur Evakuasi	20 Buah	Baik
46	RCMS	1 Buah	Baik
47	Scanner	2 Buah	Baik
48	Sepeda Motor	9 Buah	5 Baik, 4 Rusak
49	Sofa	3 Buah	Baik
50	Sound System	2 Buah	Baik
51	Tandon Air	1 Buah	Baik
52	Tangga Aluminium	3 Buah	Baik
53	Telephone	4 Buah	2 Baik, 2 Rusak
54	Tenda Pengungsi	1 Buah	Rusak
55	Traffic Cone	10 Buah	Baik
56	TV	4 Buah	Baik
57	UPS	2 Buah	Baik

Sumber Data: Sumber Data: Bakesbangpol (2022)

Sarana prasarana kantor sebagaimana tersebut diatas sudah mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sarana Prasarana untuk tahun 2022 yang harus segera dipenuhi adalah pengadaan genset dan perbaikan paving tempat parkir dan halaman.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar

Capaian kinerja Tahun 2016 – 2020 dijelaskan dalam tabel 2.3.1 berikut. Pada tahun 2016 – 2020 terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar yaitu:

1. Penanganan potensi kasus Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA)

Penanganan potensi kasus SARA sangat menjadi perhatian Bakesbangpol Kota Blitar yaitu pemantauan potensi sejak dini agar tidak sampai terjadi timbulnya kejadian kasus SARA. Meskipun di Kota Blitar selama ini sangat minim potensi Kasus SARA. Tahun 2020 terdeteksi 1 potensi kasus SARA dan dapat segera ditangani.

2. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar secara rutin dilaksanakan dan hal ini masih tergolong langka dilakukan oleh Kabupaten/Kota se Indonesia. Tahun 2020 IDI Kota Blitar adalah 86,31 lebih tinggi dari rata capaian indikator IDI tingkat Nasional yaitu 74,30 dan tingkat Provinsi Jawa Timur yaitu 72,68.

3. Penanganan konflik sosial

Penanganan konflik social juga dilakukan secara dini yaitu melakukan pemantauan potensi-potensi konflik social yang mungkin terjadi sehingga dapat mengendalikan agar tidak sampai terjadi konflik sosial. Sampai dengan Tahun 2020 konflik social dapat tertangani 100%.

4. Pemantauan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik.

Pemantauan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dilakukan dengan cara sekaligus melalui pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik di Kota Blitar. Hasil dari pembinaan tersebut, salah satunya dapat dilihat dari kesadaran organisasi untuk terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI. Dan dari Tahun 2016 sampai 2020 terjadi peningkatan jumlah organisasi yang terdaftar. Pada tahun 2021 jumlah ormas dan orpol ada 206 terdiri dari 185 ormas, yang terdaftar 162; sedangkan untuk parpol pada tahun 2021 ada penambahan 5 sehingga menjadi 21 Parpol terdaftar.

5. Kejadian SARA yang tertangani

Penanganan kasus SARA dilakukan pemantauan sejak dini yaitu masih terindikasi potensi agar tidak sampai terjadi timbulnya kejadian kasus SARA. Meskipun di Kota Blitar selama ini sangat minim potensi Kasus SARA. Tahun 2020 tidak terdeteksi kasus SARA.

Sedangkan indikator sesuai SPM, meskipun tidak masuk dalam indikator perencanaan namun dapat dihitung melalui data-data pendukung kegiatan-kegiatan pada Bakesbangpol yaitu indikator Persentase penduduk usia 14-59 tahun yang mengikuti wawasan kebangsaan dimana sampai Tahun 2020 terealisasi 83,37%.

Rasio Capaian adalah hasil perhitungan dari pembagian realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator pada Renstra pada tahun yang sama dan dikalikan dengan 100. Pada tahun 2016 – 2020 terdapat rasio yang bernilai N/A, dikarenakan operasi perhitungan pembagian tidak dapat dilakukan karena target indikator Renstra pada tahun tersebut belum tersedia.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Blitar Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun...					Realisasi Capaian Tahun...					Rasio Capaian Tahun...				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	Indikator Tujuan																		
1	Persentase penanganan potensi kasus SARA				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1	Jumlah Potensi Kasus SARA yang ditangani				-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-
1.2	Jumlah Potensi Kasus SARA				-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-
2	Indeks Demokrasi Indonesia				NA	73,6	73,6	73,6	73,6	NA	78,64	80,34	82,98	86,31	NA	106,8	109,1	112,7	117,3
B	Indikator Sasaran																		
3	Persentase konflik sosial yang tertangani (IKU)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87,5%	100%	100%	100%	100%	87,5%	100%	100%
3.1	Jumlah konflik sosial yang tertangani				-	-	-	-	-	2	2	7	17	21	-	-	-	-	-
3.2	Jumlah konflik sosial				-	-	-	-	-	2	2	8	17	21	-	-	-	-	-
3.3	Persentase penanganan konflik masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik yang Terdaftar (IKU)				70%	72%	74%	76%	78%	71,43%	72,19 %	73,20%	73,98%	76,7 %	102,04%	100,2%	98.9%	97,34 %	98,3%
4.1	Jumlah organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang terdaftar				-	-	-	-	-	130	135	142	145	155	-	-	-	-	-
4.2	Jumlah organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik				-	-	-	-	-	182	187	194	196	202	-	-	-	-	-
4.3	Persentase ormas/orpol yang dibina sesuai aturan						74%	76%	78%			73,19%	73,98%	78%			98,90 %	97,34%	100%
5	Persentase kejadian SARA yang tertangani (IKU)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.1	Jumlah kejadian SARA yang tertangani				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
5.2	Jumlah kejadian SARA				-	-	-	-	-				0	0	-	-	-	-	-
1	Indeks Kerukunan Umat Bergama				-	80	80	80	80	79,50	81,02	82,30	84,30	84,38	-	101,3	102,9	105,475	105,5
5	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat				-	-	77,5%	77,5%	77,5%	-	-	72,9%	83,8%	78,8%	-	-	94,1%	108,1%	101,7%
C	Indikator Lainnya																		
6	Persentase penduduk usia 14-59 tahun yang mengikuti wawasan kebangsaan (SPM)						70%	80%	90%				75%	83,57%				87,5%	92,85%

Sumber Data: Bakesbangpol (2022)

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota blitar tahun 2016 - 2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	604.713.475	393.070.515	1.192.322.169	2.163.366.609	823.925.350	598.517.010	386.418.915	1.144.737.233	2.008.897.027	763.112.468	98,98	98,31	96,01	92,86	92,62	1.035.479.623,60	980.336.530,60
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	166.689.100	239.500.500				159.644.950	234.087.488				95,77	97,74				81.237.920,00	78.746.487,60
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	66.240.000	67.000.000	60.000.000	120.640.000	61.491.150	64.890.000	61.030.000	52.722.000	113.437.100	59.305.000	97,96	91,09	87,87	94,03	96,44	75.074.230,00	70.276.820,00
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	13.044.000	14.891.500	4.111.200	5.000.000	10.000.000	13.044.000	11.029.500	4.111.200	5.000.000	10.000.000	100,00	74,07	100,00	100,00	100,00	9.409.340,00	8.636.940,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	346.689.861					268.437.461					77,43					69.337.972,20	53.687.492,20
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	283.011.550		891.144.520	1.189.060.675	458.309.000	273.336.250		867.852.648	1.119.462.840	403.606.000	96,58		97,39	94,15	88,06	564.305.149,00	532.851.547,60
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	297.992.100					293.158.500					100,00	74,07	100,00	100,00	100,00	9.409.340,00	8.636.940,00
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	143.332.955					117.887.480					77,43					69.337.972,20	53.687.492,20

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	32.604.608		1.088.156.734	803.001.573	830.195.075	32.604.608		976.891.464	752.290.173	708.237.515	96,58		97,39	94,15	88,06	564.305.149,00	532.851.547,60
Program Pendidikan Politik Masyarakat	282.091.754					280.277.754					98,38					59.598.420,00	58.631.700,00
Program Penyempurnaan dan Kegiatan Peningkatan Demokrasi		467.816.900	816.042.100	998.423.000	2.998.819.000		453.594.600	789.421.000	967.145.273	2.662.814.055	100,00		89,77	93,68	85,31	550.791.598,00	494.004.752,00

Pada tabel 2.3.2 diatas dijelaskan bahwa terdapat 10 (sepuluh) program pada APBD Bakesbangpol Kota Blitar tahun 2016 – 2021. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan yang merupakan salah satu program dilaksanakan hanya pada tahun 2016, yang kemudian tidak terdapat alokasi anggaran pada tahun 2017 dan seterusnya. Pada Perubahan Kedua Renstra tahun 2018 terdapat perubahan jumlah program yaitu menjadi 6 (enam) program. Adapun nomenklatur program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Penanganan Konflik dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
5. Program Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa

6. Program Pengembangan Budaya Politik dan Penguatan Demokrasi

Rasio adalah angka perbandingan antara realisasi anggaran dan jumlah anggaran pada tahun yang sama kemudian dikalikan dengan 100%. Sedangkan Rata-rata Pertumbuhan pada anggaran dan realisasi adalah nilai rata – rata dari selisih (pertumbuhan) masing – masing anggaran realisasi dari tahun ke tahun.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Penataan kelembagaan Bakesbangpol Kota Blitar menuntut seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap instansi Pemerintah untuk terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap berarti dan bahkan unggul. Peran, fungsi, dan tanggung jawab Bakesbangpol Kota Blitar saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap kinerja yang lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja Pemerintah Kota Blitar secara keseluruhan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bakesbangpol Kota Blitar memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan:

Tabel 2.4

Pelayanan internal dan eksternal Bakesbangpol Kota Blitar

Pelayanan Internal	Pelayanan Eksternal
1. Penyusunan program kerja Badan;	1. Pengurusan ijin rekomendasi penelitian;
2. Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan	2. Fasilitasi layanan organisasi politik, organisasi

Pelayanan Internal	Pelayanan Eksternal
pemeliharaan data;	kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
3. Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program;	3. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
4. Penyusunan laporan akuntabilitas;	4. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
5. Penyusunan perbendaharaan keuangan	5. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
6. Pelaksanaan verifikasi anggaran;	6. Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pembauran bangsa, serta bela negara;
7. Penyusunan pertanggungjawaban anggaran;	7. Pemantauan perkembangan politik;
8. Pengelolaan kearsipan;	8. Verifikasi bantuan keuangan partai politik;
9. Penyelenggaraan kerumahtanggaan;	9. Pengawasan Ormas;
10. Pengelolaan data kepegawaian;	10. Pemantauan Orang asing dan Lembaga Asing;
	11. Pengembangan upaya pencegahan dan penanganan konflik;
	12. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
	13. Pengembangan Kewaspadaan Dini Daerah.

2.4.1 PELUANG

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Bakesbangpol Kota Blitar ke depan adalah:

1. Adanya keselarasan visi dan misi kepala daerah dengan Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
2. Adanya kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis;
3. Terjalannya komunikasi dan koordinasi dengan instansi lain baik instansi vertikal maupun pemerintah daerah;
4. Terjalannya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan partai politik.

2.4.2 TANTANGAN

Bakesbangpol Kota Blitar dalam pengembangan pelayanan menghadapi beberapa tantangan, yaitu:

- a. Belum meratanya pemahaman politik di masyarakat;
- b. Partisipasi masyarakat terkait keamanan lingkungan masih kurang optimal.
- c. Memudarnya ideology dan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda;
- d. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi antar daerah dapat mengakibatkan masuknya paham ideology yang menyimpang;
- e. Munculnya LSM dan Ormas baru yang cenderung negatif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASAR TUGAS DAN FUNGSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu-isu strategis tersebut dapat berupa informasi, kejadian, atau fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kota Blitar maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan

Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
Masih adanya potensi konflik sosial	Belum optimalnya penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	1. Belum optimalnya kelembagaan kerukunan umat beragama
		2. Belum optimalnya pembinaan wawasan kebangsaan
		3. Belum optimalnya pencegahan gangguan ketahanan social
Belum optimalnya kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat	Belum optimalnya pembinaan budaya politik masyarakat	1. Belum optimalnya pembinaan organisasi politik
		2. Belum optimalnya pemberdayaan ormas

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Walikota Blitar periode tahun 2021 – 2026 adalah:

Visi: “Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur, Bermartabat”

Misi: Bakesbangpol Kota Blitar dalam hal ini terkait dengan tujuan Misi ke 1 (satu) adalah “Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan”.

Pada Misi 1 (satu) ini dilaksanakan dengan 6 (enam) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

3.3 Telaahan Renstra K / L dan Renstra Provinsi

Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur periode tahun 2019 – 2024 adalah:

Visi: “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”

Misi:

- (1) Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. Rencana Strategis Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024
- (2) Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
- (3) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
- (4) Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur dalam hal ini terkait dalam Misi ke (3) (tiga) yaitu: “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan”.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Blitar

Sebagaimana telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan terhadap RTRW dan KLHS bagi Bakesbangpol Kota Blitar secara hirarki juga tidak mempunyai hubungan keterkaitan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada di Bakesbangpol Kota Blitar. Untuk itu dalam Renstra ini tidak ada penjelasan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Blitar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011, Bakesbangpol Kota Blitar tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas atau tidak terkait sehingga tidak melakukan analisis pola ruang.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

a. Gambaran pelayanan PD

Sebagai wujud dari pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Blitar, yaitu:

Penguatan kesadaran, pemahaman dan pengamalan Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme bagi masyarakat Kota Blitar. Ada beberapa hal yang menjadi isu strategis diantaranya:

1. Perkembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan saat ini sudah cukup memprihatinkan, ditandai dengan semakin mudahnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat khususnya para generasi muda yang jika berkelanjutan, dikhawatirkan dapat menjerumuskan kejurang kehancuran. Menyikapi permasalahan ideologi tersebut, terbit Peraturan Menteri dalam Negeri nomor

- 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
2. Semakin menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur pancasila pada semua elemen masyarakat. Penegasan Pancasila sebagai filosofi, ideologi, jiwa, dan pandangan hidup sudah final. Akan tetapi dalam tahap pelaksanaan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
 3. Rendahnya rasa nasionalisme dan jati diri bangsa serta kurangnya wawasan kebangsaan yang akhirnya mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak lain yang mengganggu stabilitas daerah.
 4. Kewaspadaan kemungkinan timbulnya konflik antar etnis dan suku bangsa terkait pembauran kebangsaan khususnya kerukunan antar Etnis dan Suku Bangsa di Kota Blitar. Menyikapi kemungkinan timbulnya konflik etnis dan suku bangsa maka terbitlah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.
 5. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusivitas wilayah.
 6. Peningkatan kewaspadaan nasional dan daerah terhadap permasalahan yang sensitif dan urgensi yang dapat mengganggu stabilitas nasional di daerah terutama terkait dengan paham radikal dan teroris, aksi/demo unjuk rasa yang anarkis, aliran sesat keagamaan, pertikaian antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu berkaitan dengan kewaspadaan nasional dan daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, dengan tindak lanjut membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 7. Peningkatan sinergitas lintas instansi vertikal di daerah dan SKPD terkait dengan kegiatan Keintelijen dalam rangka mendeteksi dini dan memberikan peringatan dini untuk menjaga stabilitas nasional di daerah. Oleh karena itu terkait dengan keintelijen di daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, dengan tindak lanjut membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
 8. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
 9. Masih banyak Organisasi Kemasyarakatan yang belum terdaftar keberadaannya
 10. Partisipasi politik masyarakat perlu ditingkatkan.
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian dan lembaga terkait.
- Sasaran strategis pada Renstra Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Kesbang Politik Kementerian Dalam Negeri RI merupakan sasaran jangka menengah Kementerian dalam Negeri dan akan dicapai, yaitu:
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi
 2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat
 4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik
- c. Sasaran jangka menengah dari Renstra OPD Provinsi
- Memperhatikan ringkasan Renstra Ditjen Kesatuan bangsa dan Politik tersebut, khususnya pada bagian sasaran strategis, tampak adanya keselarasan perencanaan strategis Bakesbangpol Jawa Timur 2019 – 2024 berkaitan dengan tugas pokok fungsi Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Blitar

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Gambaran mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kinerja disajikan dalam berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2021-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL	TARGET DAN REALIASI KINERJA TUJUAN / SASARAN			
							2020	2022		2023	
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Indikator Tujuan:								
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) diukur melalui 4 indikator : 1. Toleransi Toleransi merupakan sikap saling mengizinkan dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan 2. Kesetaraan Kesetaraan memandang bahwa setiap manusia dilahirkan setara, meskipun memiliki keragaman identitas baik dari suku, bangsa, agama, dan sebagainya. 3. Kerjasama Kerjasama merupakan perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan. 4. Peran Pemerintah Peran pemerintah merupakan upaya intervensi pemerintah dalam kegiatan atau sisi-sisi keagamaan masyarakatnya	Nilai Indeks	Indeks		83,6	84,90	83,7	84,90* (dihitung pada tahun 2024)

			Indikator Sasaran:								
			Persentase Kejadian SARA Tertangani	SARA merupakan akronim (singkatan) dari empat kata: Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan	Jumlah Kejadian SARA Tertangani ----- x 100% Jumlah Kejadian SARA	%		100%	100%	100%	100%
			Persentase Konflik Sosial Tertangani	Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan	Jumlah Konflik Sosial Tertangani ----- x 100% Jumlah Konflik Sosial	%		100%	100%	100%	100%
			Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	- Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila - Organisasi politik adalah organisasi atau kelompok yang bergerak atau berkepentingan atau terlibat dalam proses politik dan dalam ilmu kenegaraan, secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa tersebut - Kriteria aktif Ormas dan Orpol meliputi: 1. Aktif mengupdate profil Ormas/Orpol 2. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan Ormas/ Orpol pada Bakesbangpol 3. Menghadiri sosialisasi pemberdayaan Ormas/ Orpol	Jumlah Ormas dan Orpol yang aktif ----- x 100% Jumlah Ormas dan Orpol terdaftar	%		80,1%	69,77%	80,2%	87,05%

2		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD. Penilaian dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan SAKIP pada perangkat daerah.	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	Huruf/angka	A (82,94)	A (84,96)	A (85,54)	A (84,97)	A (85,62)
---	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---	--	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN			Kondisi Akhir
							2021	2022	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan		Indikator Tujuan:									
			1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) diukur melalui 4 indikator : 1. Toleransi Toleransi merupakan sikap saling mengizinkan dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan 2. Kesetaraan Kesetaraan memandang bahwa setiap manusia dilahirkan setara, meskipun memiliki keragaman identitas baik dari suku, bangsa, agama, dan sebagainya. 3. Kerjasama Kerjasama merupakan perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib	Nilai Indeks	Indeks	84,88	84,90	84,92	84,93	84,94	84,94

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN			Kondisi Akhir
							2021	2022	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				sepenanggungan. 4. Peran Pemerintah Peran pemerintah merupakan upaya intervensi pemerintah dalam kegiatan atau sisi-sisi keagamaan masyarakatnya								
			Indikator Sasaran:									
		Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase Kejadian SARA Tertangani	SARA merupakan akronim (singkatan) dari empat kata: Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan	Jumlah Kejadian SARA Tertangani ----- x 100% Jumlah Kejadian SARA	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Konflik Sosial Tertangani	Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan	Jumlah Konflik Sosial Tertangani ----- x 100% Jumlah Konflik Sosial	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	- Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila	Jumlah Ormas dan Orpol yang aktif ----- x 100% Jumlah Ormas dan Orpol terdaftar	%	88,8%	69,77%	80,3%	80,4%	80,5%	80,5%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN			Kondisi Akhir
							2021	2022	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				- Organisasi politik adalah organisasi atau kelompok yang bergerak atau berkepentingan atau terlibat dalam proses politik dan dalam ilmu kenegaraan, secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa tersebut - Kriteria aktif Ormas dan Orpol meliputi: 1. Aktif mengupdate profil Ormas/Orpol 2. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan Ormas/ Orpol pada Bakesbangpol 3. Menghadiri sosialisasi pemberdayaan Ormas/ Orpol								
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD. Penilaian dilakukan dengan melakukan	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	Huruf/ angka	A (84,96)	A (85,54)	A (84,98)	A (84,99)	A (85)	A (85)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN			Kondisi Akhir
							2021	2022	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan SAKIP pada perangkat daerah.								

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai salah satu sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Bakesbangpol Kota Blitar. Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Perubahan Kedua Renstra Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2021-2026 ini menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Bakesbangpol Kota Blitar.

Analisa SWOT

Kekuatan (Strenghts):

1. Peraturan Walikota Blitar Nomor: 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Penyediaan Anggaran kegiatan Bakesbangpol Kota Blitar;
3. Adanya akses yang baik kepada infra struktur politik dan supra struktur politik;
4. Adanya koordinasi yang baik di jajaran Bakesbangpol Kota Blitar;
5. Tersedianya Sumber Daya Manusia;
6. Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral.

Kelemahan (Weaknesses):

1. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum optimal; Belum optimalnya pemanfaatan sarana Teknologi Informasi yang tersedia;
2. Peran Bakesbangpol Kota Blitar secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga Bakesbangpol Kota Blitar kurang di kenal Masyarakat;
3. Job Discription yang kurang tepat dan kurang jelas yang sering kali over laping (tumpang tindih) dengan Badan/Dinas/Kantor lain.

Peluang (Opportunities)

1. Masih adanya kebutuhan Masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra struktur Politik dan Supra Struktur Politik, Wawasan Kebangsaan, Ketertiban/Ketentraman, Demokrasi dan HAM;
2. Partisipasi Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi;

Ancaman (Treaths):

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara Nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD;
2. Keraguan Masyarakat terhadap netralitas seorang PNS;
3. Relatif tingginya potensi konflik di masyarakat (Vertikal, Horisontal dan SARA).

Berdasarkan analisa SWOT seperti tersebut diatas telah jelas, maka alternatif Strategi Bakesbangpol Kota Blitar dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Memanfaatkan loyalitas aparaturnya untuk menjalin kerja sama dengan instansi terkait baik di daerah maupun di pusat serta kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan pemuda;
2. Meningkatkan tatanan kehidupan Masyarakat yang aman dan kondusif;

3. Memanfaatkan kualitas dan keahlian aparatur sesuai disiplin ilmu dan tupoksi masing – masing;
4. Meningkatkan ketersediaan data yang akurat;
5. Meningkatkan kompetensi aparatur;
6. Meningkatkan kenyamanan di lingkungan kerja;
7. Mengoptimalkan koordinasi dengan SKPD lain dan Pemerintah Pusat;
8. Meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan terhadap potensi instabilitas keamanan dan ketertiban umum.

MATRIKS ANALISA SWOT

Kesimpulan Analisa Faktor Intern (KAFI)		No.	Kekuatan (S)	No.	Kelemahan (W)
		1.	Peraturan WaliKota Blitar Nomor 15 Tahun 2022	1.	Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum optimal
		2.	Penyediaan anggaran kegiatan Bakesbangpol Kota Blitar	2.	Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia
		3.	Adanya akses yang baik kepada infra struktur dan supra struktur Politik	3.	Peran Bakesbangpol Kota Blitar secara mendasar belum menyentuh Masyarakat
		4.	Adanya koordinasi yang baik di jajaran Bakesbangpol Kota Blitar dengan Badan / Dinas / Kantor / Bagian terkait.	4.	Sehingga Bakesbangpol Kota Blitar kurang di kenal Masyarakat
		5.	Tersedianya Sumber Daya Manusia	5.	Job Discirption yang kurang tepat dan kurang jelas yang sering kali overlapping (tumpang tindih) dengan Badan / Dinas / Kantor maupun Bagian
		6.	Adanya bentuk jejaring sebagai wadah / koordinasi lintas sektoral		
No.	Peluang (O)	No.	Pendorong (SO)	No.	Status (WO)
1.	Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, Demokrasi dan HAM	1.	Peningkatan peran dalam pemberdayaan infra dan supra struktur Politik, Wawasan kebangsaan, demokrasi dan HAM	1.	Peningkatan Sosialisasi eksistensi Bakesbangpol Kota Blitar melalui terobosan – terobosan strategi dengan melibatkan partisipasi infra dan supra struktur Politik.
2.	Partisipasi Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan Demokrasi	2.	Peningkatan kerja sama (fasilitasi) dengan Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi	2.	Meningkatkan harmonisasi dan komunikasi sosial politik dengan elemen Masyarakat
				3.	Meningkatkan situasi dan kondisi yang kondusif di Kota Blitar
				4.	Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM di Kota Blitar
No.	Ancaman (T)	No.	Status Quo (ST)	No.	Penghambat (WT)
1.	Seringnya terjadi perubahan	1.	Melakukan kegiatan yang menyentuh	1.	Peningkatan kualitas SDM

	kebijakan secara Nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD		kepentingan masyarakat banyak	2.	Meningkatkan kewaspadaan dini dengan menggunakan akses dan koordinasi yang baik dengan infra dan supra struktur Politik
		2.	Meningkatkan peran dan fungsi sebagai pelayanan public		
2.	Keraguan masyarakat terhadap netralitas seorang PNS	3.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam angka pendidikan dan pembangunan di Bidang IPOLEKSOSBUD		
3.	Relatif tingginya potensi konflik di masyarakat (Vertikal, Horisontal dan SARA)	4.	Melakukan koordinasi dengan infra dan supra struktur Politik untuk mengatasi potensi konflik		
		5.	Melakukan koordinasi dengan infra dan supra struktur Politik untuk mengatasi potensi konflik sosial		

Strategi dan arah kebijakan Renstra Badan kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana table berikut:

Tabel. 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	: “Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur, Bermartabat”		
Misi 1	: “Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan”		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Memperkuat kelembagaan kerukunan umat beragama
			Penguatan wawasan kebangsaan
			Peningkatan nilai religiusitas
		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Penguatan anti radikalisme
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan pencegahan gangguan ketahanan social
		Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	partai politik harus bisa mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan masyarakat sebanyak mungkin, dengan mengedepankan bahwa partai politik berjuang untuk masyarakat dan kepentingan umum.
		Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	ormas dapat membantu meningkatkan kualitas masyarakat, serta membantu terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangol) Kota Blitar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Penjabarannya dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam Matriks Program Lima Tahunan Bakesbangpol Kota Blitar.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan
Badan kesatuan bangsa dan politik
Kota Blitar Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2022			
						2020	K	Rp	K	Rp		
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Sasaran:										
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai Sakip PD	nilai	A (82,94)	A (84,96)					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	Indeks	A (88,6)	A (88,65)	4.297.931.428	88,69	3.918.692.760	Sekretariat	Kota Blitar
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%	%	100	100	27.001.300	100	25.130.700		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun (RENSTRA, PK, RENAKSI, PROBIS, SOP, RENJA, RKA, DPA, PRKA, DPPA, GENDER)	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah disusun pada tahun berjalan	dokumen	11	11	8.510.200	11	8.455.200		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, Evaluasi RKPD, Pengukuran kinerja tribulan, monev tribulan, SPIP, ZI)	Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, Evaluasi RKPD, Pengukuran kinerja tribulan, monev tribulan, SPIP, ZI) pada tahun berjalan	dokumen	8	9	18.491.100	9	16.675.500		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%	%	100	100	3.449.976.028	2	2.901.598.640		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan pada tahun berjalan	ASN	21	21	3.441.411.228	19	2.896.033.640		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran) pada tahun berjalan	dokumen	5	5	8.564.800	5	5.565.000		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	73.392.200	100	73.861.700		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2022			
						2020	K	Rp	K	Rp		
			perangkat daerah yang sesuai standar	yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%								
	Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun berjalan	event	4	4	73.392.200	4	73.861.700			
		Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	jenis	3	3		3	-			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%	%	100	100	443.272.200	7	465.604.919			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia pada tahun berjalan	komponen	6	6	8.814.000	5	6.388.500			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi (TERMASUK MEBELAIR)	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi (TERMASUK MEBELAIR) pada tahun berjalan	jenis	0	1	173.897.300	7	221.487.000			
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun berjalan	jenis	0	0		1				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia pada tahun berjalan	jenis	28	28	16.234.700	27	16.183.000			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia pada tahun berjalan	dos	1020	1020	47.983.600	480	41.496.000			
		Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia pada tahun berjalan	jenis	43	43		43	-			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia pada tahun berjalan	cetakan	8	8	38.807.600	8	29.719.500			
		Jumlah lembar penggandaan	Jumlah lembar penggandaan pada tahun berjalan	lembar	28473	28473		14556	-			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia pada tahun berjalan	bahan bacaan	3	3	7.440.000	3	7.440.000			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti pada tahun berjalan	rakor	45	45	150.095.000	44	142.890.919			
	Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase penyediaan jasa	Jml penunjang urusan	%	100	100	88.929.000	2	182.908.701			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Klnerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Klnerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2022				
							2020	K Rp	K Rp				
Umat Beragama	Silaturahmi Antar Umat Beragama		Persentase kejadian SARA tertangani	Jumlah kejadian SARA tertangani/ Jumlah kejadian SARA x 100 %	%	100	100		100				
			Persentase konflik sosial tertangani	Jumlah konflik sosial tertangani / Jumlah konflik sosial x 100 %	%	100	100		100				
			Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	Jumlah Ormas dan Orpol yang aktif / Jumlah Ormas dan Orpol terdaftar x 100 %	%	80	80,1		69,77				
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penyelesaian konflik keagamaaaan	Jumlah penyelesaian potensi konflik keagamaaaan /jml potensi konflik keagamaaaan x 100%	%	NA	100	623.972.900	100	655.660.700	BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA	Kota Blitar	
				Definisi operasional yang dimaksud konflik keagamaan adalah potensi konflik keagamaan									
			Persentase kampung berkarakter Pancasila	Jumlah kampung berkarakter Pancasila yang terbentuk di kelurahan: Jumlah Kelurahan X 100%	%	NA	9,5			9,5			-
		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	jumlah masy yg mengikuti pembinaan yg nilai post tesnya di atas 50/ jml masy yg mengikuti pembinaan x 100%	%	NA	81	623.972.900	85	655.660.700			
			Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila	Jumlah kampung berkarakter Pancasila yang terbentuk	kampung	1	3			2			-
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1. Jumlah peserta pembinaan ideologi Pancasila	1. Jumlah peserta pembinaan ideologi Pancasila pada tahun berjalan	orang	0	200	348.972.900	200	381.401.700			
			2. Jumlah peserta talkshow Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	2. Jumlah peserta talkshow Forum Kerukunan Umat Beragama pada tahun berjalan	orang	0	100			0			-
			3. Jumlah peserta dialog Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	3. Jumlah peserta dialog Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)pada tahun berjalan	orang	0	100			0			-
			4. Jumlah peserta diklat bela negara	4. Jumlah peserta diklat bela negara pada tahun berjalan	orang	0	100			100			-
			5. Jumlah anggota korsik yang terfasilitasi	5. Jumlah anggota korsik yang terfasilitasi pada tahun berjalan	orang	50	50			50			-
			6. Jumlah even yang menunjang pembinaan wawasan kebangsaan	6. Jumlah even yang menunjang pembinaan wawasan kebangsaan pada tahun berjalan	event	2	2			1			-
			7. Jumlah pembentukan dan pendampingan Kampung	8. Jumlah pembentukan dan pendampingan Kampung	orang	1	3			2			-

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target KInerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Realisasi KInerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2022			
						2020	K	Rp	K	Rp		
			berkarakter Pancasila	berkarakter Pancasila pada tahun berjalan								
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1. Jumlah dokumen indeks kerukunan umat beragama	1. Jumlah dokumen indeks kerukunan umat beragama pada tahun berjalan	dokumen	1	1	275.000.000	1	274.259.000		
			1. Jumlah Lembaga yang mendapatkan hibah	2. Jumlah Lembaga yang mendapatkan hibah pada tahun berjalan	lembaga	0	2		2	-		
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Jumlah partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat: Jumlah partai politik yang mendapatkan kursi di legislatif x 100%	%	NA	100	747.232.075	100	610.375.472	BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Blitar
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik yang nilai post testnya minimal 50 : Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik x 100%	%	NA	81	747.232.075	90	610.375.472		
		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1. Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu	1. Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu pada tahun berjalan	orang	2110	200	38.035.800	200	33.508.000		
			2. Jumlah tim desk pemilu yang terfasilitasi	2. Jumlah tim desk pemilu yang terfasilitasi pada tahun berjalan	orang	0	0		15	29.978.100		
			3. Jumlah petugas pemantau pemilu yang terfasilitasi	3. Jumlah petugas pemantau pemilu yang terfasilitasi pada tahun berjalan	orang	521	0		0	-		
			4. Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung pemilu yang terfasilitasi	4. Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung pemilu yang terfasilitasi pada tahun berjalan	jenis	3	0		150	-		
			5. Jumlah lembaga penyelenggara pemilu yang mendapatkan hibah	5. Jumlah lembaga penyelenggara pemilu yang mendapatkan hibah pada tahun berjalan	lembaga	2	0		0	546.889.372		
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	1. Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan politik	1. Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan politik pada tahun berjalan	parpol	0	15	49.290.700	0	-		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2022			
							2020	K	Rp	K		
		Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2. Jumlah peserta pendidikan politik	2. Jumlah peserta pendidikan politik pada tahun berjalan	orang	0	120		8	-		
			3. Jumlah peserta peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik	3. Jumlah peserta peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik pada tahun berjalan	orang	0	150		100	610.375.472		
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. Jumlah dokumen IDI yg tersusun	1. Jumlah dokumen IDI yg tersusun pada tahun berjalan	dokumen	1	1	659.905.575	90	610.375.472		
			2. Jumlah peserta peningkatan kualitas demokarasi	2. Jumlah peserta peningkatan kualitas demokarasi pada tahun berjalan	orang	0	40		200	33.508.000		
			3. Jumlah penerima hibah parpol	3. Jumlah penerima hibah parpol pada tahun berjalan	parpol	8	8		15	29.978.100		
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif: Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar x 100%	%	NA	65	132.617.500	68,23	73.778.000	BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Blitar
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif pada tahun berjalan	ormas	NA	125	132.617.500	131	73.778.000		
		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1. Jumlah Peserta pembinaan dan pengawasan ormas	1. Jumlah Peserta pembinaan dan pengawasan ormas pada tahun berjalan	orang	0	120	132.617.500	50	73.778.000		
			2. Jumlah peserta Pengelolaan sistem informasi ormas	2. Jumlah peserta Pengelolaan sistem informasi ormas pada tahun berjalan	orang	0	120		50	-		
			3. Jumlah ormas yang mengikuti pemberdayaan ormas	3. Jumlah ormas yang mengikuti pemberdayaan ormas pada tahun berjalan	ormas	0	30		0	-		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan nilai post testnya minimal 50 /jml masy yang mengikuti pembinaan x 100%	%	NA	75	c	93,33	1.635.091.100	BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN	Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target KInerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Realisasi KInerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2022			
						2020	K	Rp	K	Rp		
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi: Jumlah masyarakat yang diundang mengikuti sosialisasi x 100%	%	NA	85	1.526.899.600	100	1.635.091.100	KETAHAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1. Jumlah Rapat koordinasi Tim SATLAK pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN)	1. Jumlah Rapat koordinasi Tim SATLAK pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) pada tahun berjalan	kali	2	3	276.899.600	1	308.455.100			
		2. Jumlah peserta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan miras dan narkoba	2. Jumlah peserta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan miras dan narkoba pada tahun berjalan	orang	75	75		75	-			
		3. Jumlah Rapat koordinasi Tim Terpadu penanganan konflik sosial	3. Jumlah Rapat koordinasi Tim Terpadu penanganan konflik sosial pada tahun berjalan	kali	4	4		0	-			
		4. Jumlah posko pengamanan kegiatan daerah	4. Jumlah posko pengamanan kegiatan daerah pada tahun berjalan	posko	3	3		5	-			
		5. Jumlah petugas yang membantu pengamanan pencegahan penanganan konflik	5. Jumlah petugas yang membantu pengamanan pencegahan penanganan konflik pada tahun berjalan	orang	4125	1288		1267	-			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Lembaga yang mendapatkan hibah	Jumlah Lembaga yang mendapatkan hibah pada tahun berjalan	lembaga	3	3	1.250.000.000	3	1.326.636.000			
		Jumlah laporan movev Recana Aksi P4GN	Jumlah laporan movev Recana Aksi P4GN pada tahun berjalan	laporan	0	1		0	-			
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	Jumlah potensi Konflik Sosial yang terselesaikan: Jumlah potensi Konflik Sosial x 100%	%	100	100	164.530.500	100	188.718.590	BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	Kota Blitar	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	Jumlah potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti: Jumlah potensi konflik sosial yang diterima x 100%	%	100	100	164.530.500	100	188.718.590			
	Pelaksanaan Koordinasi di	1. Jumlah peserta rakor tim	1. Jumlah peserta rakor tim	orang	50	90	158.630.500	90	188.718.590			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2022		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							2020	K	Rp	K	Rp	
		Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	kewaspadaan dini Pemerintah Daerah	kewaspadaan dini Pemerintah Daerah pada tahun bersangkutan pada tahun berjalan								
			2. Jumlah rapat koordinasi FKDM Kota	2. Jumlah fasilitas FKDM Kota pada tahun berjalan	kali	4	4		4	-		
			3. Jumlah rapat koordinasi tim terpadu anti radikalisme	3. Jumlah fasilitas tim terpadu anti radikalisme pada tahun berjalan	kali	0	0		0	-		
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1. Jumlah laporan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengawasan orang asing di Kota Blitar	1. Jumlah laporan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengawasan orang asing di Kota Blitar pada tahun berjalan	laporan	0	1	5.900.000	100	188.718.590		
			2. Jumlah Lembaga pengaman pemilu yang mendapatkan hibah	2. Jumlah Lembaga pengaman pemilu yang mendapatkan hibah pada tahun berjalan	lembaga	2	0		100	188.718.590		
					JUMLAH TOTAL			7.493.184.003		7.082.316.622		

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Blitar Tahun 2023

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2023			
					K	Rp		
	BAKESBANGPOL							
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	Tujuan: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah							
	Sasaran: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai Sakip PD		A (84,97)			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	Indeks	A (88,7)	4.512.327.999	Sekretariat	Kota Blitar
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	%	100	51.800.629		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan (Renstra, Renja, PK, PK Perubahan, IKU, IKI, IKI Perubahan, RKA, P-RKA, Gender, Renaksi, SK)	Dokumen	12	8.234.028		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan (LKjIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi RKPD TB. 1,2,3,4, Pengukuran Kinerja TB 1,2,3,4, 1 thn, Monev TB 1,2,3,4, 1 thn, ZI, RB, SAKIP)	Laporan	20	43.566.601		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100 % Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	%	100	2.846.027.829		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	Orang/bulan	19	2.837.736.828		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
	BAKESBANGPOL							
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD pada tahun berjalan	Laporan	5	8.291.001		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenisadministrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	%	100	140.000.000		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada tahun berjala	Paket	2	50.000.000		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	Orang	19	90.000.000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	%	100	548.366.041		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	30.000.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	3	50.000.000		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	2	30.000.000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	12	31.513.980		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	45.000.000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Dokumen	24	7.800.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	Laporan	40	354.052.061		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 %	%	100	200.000.000		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
	BAKESBANGPOL							
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	0	0		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	13	100.000.000		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	4	100.000.000		
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	%	100	246.133.500		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan	36	45.433.500		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan	13	200.700.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah jenis BMD yang terpelihara ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	%	100	480.000.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	Unit	10	125.000.000		
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	8	30.000.000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	69	50.000.000		
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit	2	175.000.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit	1	100.000.000		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2023			
					K	Rp		
	BAKESBANGPOL							
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	Tujuan:	Indikator Tujuan:						
	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai Indeks	Indeks	83,7			
	Sasaran	Indikator Sasaran:						
	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Persentase kejadian SARA tertangani	Jumlah kejadian SARA tertangani/ Jumlah kejadian SARA x 100 %	%	100			
		Persentase konflik sosial tertangani	Jumlah konflik sosial tertangani / Jumlah konflik sosial x 100 %	%	100			
		Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	Jumlah Ormas dan Orpol yang aktif / Jumlah Ormas dan Orpol terdaftar x 100 %	%	80,2			
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penyelesaian konflik keagamaaan	Jumlah penyelesaian potensi konflik keagamaaan /jml potensi konflik keagamaaan x 100%	%	100	655.171.545	BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAA N DAN KETAHAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA	Kota Blitar
			Definisi operasional yang dimaksud konflik keagamaan adalah potensi konflik keagamaan					
		Persentase kampung berkarakter Pancasila	Jumlah kampung berkarakter Pancasila yang terbentuk di kelurahan: Jumlah Kelurahan X 100%	%	9,5			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	jumlah masy yg mengikuti pembinaan yg nilai post tesnya di atas 50/ jml masy yg mengikuti pembinaan x 100%	%	82	655.171.545		
		Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila	Jumlah kampung berkarakter Pancasila yang terbentuk	kampung	2			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada tahun bersangkutan	orang	100	230.171.545		
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada tahun bersangkutan	laporan	3	375.000.000		
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan	keluarga	100	50.000.000		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2023			
					K	Rp		
	BAKESBANGPOL							
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Bernegara						
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Jumlah partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat: Jumlah partai politik yang mendapatkan kursi di legislatif x 100%	%	100	784.593.679	BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Blitar
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik yang nilai post testnya minimal 50: Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik x 100%	%	82	784.593.679		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada tahun bersangkutan	orang	500	139.378.042		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada tahun bersangkutan	orang	100	66.965.281		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, Peningkatan	laporan	9	578.250.356		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2023			
					K	Rp		
	BAKESBANGPOL							
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada tahun bersangkutan					
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif: Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar x 100%	%	68	173.250.500		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif pada tahun bersangkutan	ormas	120	173.250.500		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah pada tahun bersangkutan	orang	150	173.250.500		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan nilai post testnya minimal 50 /jml masy yang mengikuti pembinaan x 100%	%	77	1.540.744.580	BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAA N DAN KETAHAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA	Kota Blitar
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi: Jumlah masyarakat yang diundang mengikuti sosialisasi x 100%	%	87	1.540.744.580		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada tahun bersangkutan	orang	250	840.744.580		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	laporan	1	700.000.000		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2023			
					K	Rp		
	BAKESBANGPOL							
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada tahun bersangkutan				BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANA N KONFLIK	Kota Blitar
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	Jumlah potensi Konflik Sosial yang terselesaikan: Jumlah potensi Konflik Sosial x 100%	%	100	172.757.025		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaa n Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	Jumlah potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti: Jumlah potensi konflik sosial yang diterima x 100%	%	100	172.757.025		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada tahun bersangkutan	orang	1810	35.000.000		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada tahun bersangkutan	laporan	2	100.000.000		
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun bersangkutan	dokumen	1	37.757.025		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2023			
					K	Rp		
	BAKESBANGPOL							
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
			TOTAL			7.838.845.328		

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Blitar Tahun 2024-2026

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	BAKESBANGPOL													
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	Tujuan: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah													
	Sasaran: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai Sakip PD		A (84,98)		A (84,99)		A (85)		A (85)			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	BAKESBANGPOL													
	PERENCANAAN													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	Indeks	A (88,75)	4.737.444.399	A (88,8)	4.973.816.619	A (88,85)	5.222.007.450	A (88,85)	23.743.527.895	Sekretariat	Kota Blitar
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar -----x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	%	100	54.390.660	100	57.110.193	100	59.965.703	100	250.268.485		
01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan (Renstra, Renja, PK, PK Perubahan, IKU, IKI, IKI Perubahan, RKA, P-RKA, Gender, Renaksi, SK)	Dokume n	12	8.645.729	12	9.078.016	12	9.531.917	48	43.999.890		
01.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan (LKjIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi RKPD TB. 1,2,3,4, Pengukuran Kinerja TB 1,2,3,4, 1 thn, Monev TB 1,2,3,4, 1 thn, ZI, RB, SAKIP)	Laporan	20	45.744.931	20	48.032.178	20	50.433.786	80	206.268.596		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	BAKESBANGPOL													
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100 % Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	%	100	2.988.329.220	100	3.137.745.681	100	3.404.600.608	100	15.826.679.366		
01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	Orang/b ulan	19	2.979.623.669	19	3.128.604.853	19	3.395.002.738	19	12.340.968.088		
01.2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD pada tahun berjalan	Laporan	5	8.705.551	5	9.140.829	5	9.597.870	20	44.300.051		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenisadministrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	%	100	90.000.000	100	125.000.000	100	137.000.000	100	565.392.200		
01.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada tahun berjalan	Paket	2	30.000.000	2	40.000.000	2	42.000.000	8	162.000.000		
01.2.05. 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	Orang	19	60.000.000	19	85.000.000	19	95.000.000	19	403.392.200		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	BAKESBANGPOL													
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	%	100	166.279.679	100	203.843.663	100	465.510.846	100	1.827.272.429		
01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	5.000.000	1	5.250.000	1	30.000.000	4	79.064.000		
01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	3	5.000.000	3	8.000.000	3	50.000.000	12	286.897.300		
01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	2	5.000.000	2	10.000.000	2	60.000.000	8	121.234.700		
01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	12	33.089.679	12	34.744.163	12	36.481.371	48	183.812.793		
01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	10.000.000	1	10.500.000	1	30.000.000	4	134.307.600		
01.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Dokume n	24	8.190.000	24	8.599.500	24	9.029.475	96	41.058.975		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	BAKESBANGPOL													
01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	Laporan	40	89.610.500	40	115.841.025	45	238.545.577	165	948.144.163		
01.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	Dokume n	1	10.389.500	1	10.908.975	1	11.454.423	1	32.752.898		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	%	100	1.038.000.000	100	1.018.900.000	100	305.000.000	100	2.561.900.000		
01.2.07. 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	2	850.000.000	2	920.000.000	3	135.000.000	7	1.905.000.000		
01.2.07. 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	2	8.000.000	2	8.400.000	10	100.000.000	27	216.400.000		
01.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	1	10.000.000	1	10.500.000	4	100.000.000	10	220.500.000		
01.2.07. 0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	1	20.000.000	0	0	0	0	1	20.000.000		
01.2.07. 00011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	0	0	1	150.000.000	1	50.000.000	2	200.000.000		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	BAKESBANGPOL													
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	%	100	258.440.175	100	271.362.184	100	284.930.293	100	1.149.795.152		
01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan	36	47.705.175	36	50.090.434	36	52.594.955	144	239.217.564		
01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan	13	210.735.000	13	221.271.750	13	232.335.338	52	910.577.588		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah jenis BMD yang terpelihara ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	%	100	142.004.664	100	159.854.897	100	565.000.000	100	1.562.220.261		
01.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	Unit	12	85.000.000	14	100.000.000	17	125.000.000	17	522.879.900		
01.2.09. 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	5	5.000.000	5	5.250.000	8	50.000.000	26	90.250.000		
01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	10	10.000.000	10	10.500.000	69	75.000.000	158	169.535.300		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	BAKESBANGPOL													
01.2.09. 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	1	10.000.000	1	10.500.000	1	35.000.000	3	55.500.000		
01.2.09. 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit	1	17.004.664	1	17.854.897	2	180.000.000	6	471.739.561		
01.2.09. 0011	Pemeliharaan/Rehabiti lasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit	1	15.000.000	1	15.750.000	5	100.000.000	8	252.315.500		
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
	Tujuan	Indikator Tujuan:												
	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai Indeks	Angka	83,85		84		84,25		84,25			
	Sasaran	Indikator Sasaran:												
	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani	Jumlah kejadian SARA tertangani/ Jumlah kejadian SARA x 100 %	%	100		100		100		100			
		Persentase konflik sosial tertangani	Jumlah konflik sosial tertangani / Jumlah konflik sosial x 100 %	%	100		100		100		100			

[illegible]

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	BAKESBANGPOL													
8.01.02. 2.01.000 5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada tahun bersangkutan	laporan	3	375.000.000	3	375.000.000	3	375.000.000	12	1.775.000.000		
8.01.02. 2.01.000 6	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara pada tahun bersangkutan	keluarga	200	75.000.000	300	110.000.000	300	134.250.000	900	369.250.000		
8.01.02. 2.01.000 7	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka pada tahun bersangkutan	dokume n	1	39.655.020	1	39.554.438	1	41.352.160	3	120.561.618		
8.01.02. 2.01.000 8	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Jumlah Paskibraka pada tahun bersangkutan	orang	78	39.655.020	78	39.554.438	78	41.352.160	78	120.561.618		
8.01.02. 2.01.000 9	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila pada tahun bersangkutan	dokume n	1	39.655.020	1	39.554.438	1	41.352.160	3	120.561.618		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	BAKESBANGPOL													
8.01.02. 2.01.001 0	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila pada tahun bersangkutan	dokume n	1	39.655.020	1	39.554.438	1	41.352.160	3	120.561.618		
8.01.02. 2.01.001 1	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila pada tahun bersangkutan	orang	78	39.655.020	78	39.554.438	78	41.352.160	78	120.561.618		
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Jumlah partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat: Jumlah partai politik yang mendapatkan kursi di legislatif x 100%	%	100	25.781.888.893	100	862.917.807	100	906.063.698	100	29.082.696.152	BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISAS I KEMASYAR AKATAN	Kota Blitar
8.01.03. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik yang nilai post testnya minimal 50: Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik x 100%	%	83	25.781.888.893	84	862.917.807	85	906.063.698	85	29.082.696.152		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	BAKESBANGPOL													
8.01.03. 2.01.000 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada tahun bersangkutan	orang	500	23.493.638.537	250	125.000.000	250	131.250.000	1500	23.927.302.379		
8.01.03. 2.01.000 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada tahun bersangkutan	orang	200	200.000.000	200	130.754.933	200	137.292.680	700	584.303.594		
8.01.03. 2.01.000 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	laporan	11	2.088.250.356	9	607.162.874	9	637.521.018	38	4.571.090.179		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	BAKESBANGPOL													
	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada tahun bersangkutan											
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif: Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar x 100%	%	72	181.912.000	75	191.008.125	80	200.558.531	80	879.346.656		
8.01.04. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif pada tahun bersangkutan	ormas	121	181.912.000	122	191.008.125	123	200.558.531	123	879.346.656		
8.01.04. 2.01.000 2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah pada tahun bersangkutan	orang	200	181.912.000	200	191.008.125	200	200.558.531	750	879.346.656		
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan nilai post testnya minimal 50 /jml masy yang mengikuti pembinaan x 100%	%	78	1.555.281.809	79	1.570.545.899	80	1.586.573.194	80	7.780.045.082	BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSA AN DAN	Kota Blitar

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	BAKESBANGPOL													
8.01.05. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi: Jumlah masyarakat yang diundang mengikuti sosialisasi x 100%	%	90	1.555.281.809	93	1.570.545.899	95	1.586.573.194	95	7.780.045.082	KETAHAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA	
8.01.05. 2.01.000 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada tahun bersangkutan	orang	300	845.281.809	300	850.545.899	300	856.573.194	1150	3.670.045.082		
8.01.05. 2.01.000 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada tahun bersangkutan	laporan	1	710.000.000	1	720.000.000	1	730.000.000	4	4.110.000.000		
8.01.06.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	Jumlah potensi Konflik Sosial yang terselesaikan: Jumlah potensi Konflik Sosial x 100%	%	100	181.394.876	100	190.464.620	100	199.987.851	100	909.13 4.872	BIDANG KEWASPAD AAN NASIONAL DAN PENANGANA	Kota Blitar

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target KInerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	BAKESBANGPOL													
8.01.06. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	Jumlah potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti: Jumlah potensi konflik sosial yang diterima x 100%	%	100	181.394.876	100	190.464.620	100	199.987.851	100	909.13 4.872	N KONFLIK	
8.01.06. 2.01.000 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada tahun bersangkutan	orang	1810	36.750.000	1810	38.587.500	1810	40.516.875	7240	309.484.875		
8.01.06. 2.01.000 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada tahun bersangkutan	laporan	2	105.000.000	2	110.250.000	2	115.762.500	8	436.912.500		

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Ddaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	BAKESBANGPOL													
8.01.06. 2.01.000 6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun bersangkutan	dokume n	1	39.644.876	1	41.627.120	1	43.708.476	4	162.737.497		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BLITAR

Berdasarkan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, maka Pembangunan Kota Blitar 2021 – 2026 berangkat dari landasan Visi “Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur, Bermartabat”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka terdapat beberapa misi, dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar berada pada misi ke-1 (satu) yaitu “Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan” misi tersebut bertujuan untuk terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis. Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Kota Blitar 2021 – 2026 tersebut, maka Bakesbangpol Kota Blitar menentukan Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana tabel Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
Tahun 2022 – 2023 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
				Tahun	Tahun
				2022	2023
	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Tujuan:			
		Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	83,6	83,7
		Sasaran			
		Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Persentase Kejadian SARA Tertangani	100%	100%
			Persentase konflik sosial tertangani	100%	100%
			Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,1%	80,2%

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
Tahun 2024 – 2026 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja			
				Tahun	Tahun	Tahun	Akhir Periode Renstra
				2024	2025	2026	
	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Tujuan:					
		Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	83,85	84	84,25	84,25
		Sasaran:					
		Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase Kejadian SARA Tertangani	100%	100%	100%	100%
			Persentase konflik sosial tertangani	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,3%	80,4%	80,5%	80,5%

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar aja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2022 – 2026

No	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan	Persentase kejadian SARA tertangani	Jumlah kejadian SARA tertangani/ Jumlah kejadian SARA x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase konflik sosial tertangani	Jumlah konflik sosial tertangani / Jumlah konflik sosial x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	Jumlah Ormas dan Orpol yang aktif / Jumlah Ormas dan Orpol terdaftar x 100 %	80,1%	80,2%	80,3%	80,4%	80,5%

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD, adalah perubahan perencanaan Satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun. Perubahan Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama Tahun 2021 – 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Perubahan Kedua Renstra Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar dan disahkan dengan Keputusan Kepala Bakesbangpol Kota Blitar. Perubahan Kedua Renstra dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol Kota Blitar. Selain itu, Perubahan Kedua Renstra dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Perubahan Kedua Renstra Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2021–2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Bakesbangpol Kota Blitar dalam melaksanakan tugas tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penjabaran visi dan misi, maka partisipasi dan komitmen seluruh aparat Bakesbangpol Kota Blitar sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparat dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Perlu disampaikan bahwa Perubahan Kedua Renstra ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanaan pembangunan di Kota Blitar, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Perubahan Kedua Renstra membutuhkan kecermatan, kreatifitas, dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Bakesbangpol Kota Blitar maka perubahan rencana strategis ini akan dilakukan penyesuaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya Perubahan Kedua Renstra Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan bidang–bidang dilingkungan Bakesbangpol Kota Blitar. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.